

**ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN  
ANGGARAN DI DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG**

**SKRIPSI**

**CINTHIA CHRISTY**

**NIM : 16622080**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN  
TANJUNGPINANG  
2021**

**ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN  
ANGGARAN DI DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi

Oleh

**CINTHIA CHRISTY**

**NIM : 16622080**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN  
TANJUNGPINANG  
2021**

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Nama : CINTHIA CHRISTY  
NIM : 16622080

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal 21 Januari 2021

Panitia Komisi Ujian

Ketua,

Sekretaris,

**Ranti Utami, SE.M.Si.Ak.CA**  
NIDN. 1004117701 / Lektor

**Bambang Sambodo, SE., M.Ak**  
NIDN. 8833900016 / Asisten Ahli

Anggota,

**Afriyadi, ST., ME**  
NIDN. 1003057101 / Asisten Ahli

Tanjungpinang, Januari 2020  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)  
Pembangunan Tanjungpinang,  
Ketua,

**Charly Marlinda, SE., M.Ak.Ak.CA**  
NIDN. 1029127801 / Lektor

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG**

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan  
Tanjungpinang

Oleh

Nama : CINTHIA CHRISTY

Nim : 16622080

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua ,

**Ranti Utami, SE.M.Si.Ak.CA**  
NIDN : 1004117701 / Lektor

**Hendy Satria, SE.M.Ak.CA**  
NIDN : 1015069101 / Lektor

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,

**Hendy Satria, SE.M.Ak.CA**  
NIDN : 1015069101 / Lektor

## PERNYATAAN

Nama : CINTHIA CHRISTY  
Nim : 16622080  
Tahun Angkatan : 2016  
Indeks Prestasui Kumulatif : 3,39  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran  
di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota  
Tanjungpinang.

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 21 Januari 2021

Penyusun,

Materai 6000

CINTHIA CHRISTY  
NIM: 16622080

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah serta rasa syukur kepada Allah SWT. Karena atas Ridha Allah SWT. Saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini khusus saya persembahkan kepada kedua orangtua saya tercinta

**Bapak (Alm) Coky Iskandar**

**Ibu (Almh) Nuryati**

Terimakasih sudah membesarkanku, telah memberikan doa cinta dan kasih sayang semasa hidup kalian untuk saya, walaupun kita telah beda dimensi tapi berkat kalian lah saya bisa meraih semuanya dan melangkah sejauh ini, berkat motivasi yang selalu kalian berikan semasa hidup. Semoga apa yang dipersembahkan ini bisa membuat kedua orangtua bangga.

Serta,

Ku persembahkan skripsi ini kepada Almamaterku Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang, terimakasih juga untuk orang-orang tersayangku keluarga tercinta serta teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan saran, masukan serta motivasinya.

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (6)

**"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,  
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan." (al-Insyirah,**

**Ayat 5-6)**

**Tidak ada yang tidak mungkin selagi Allah SWT. Berkehendak, terus  
lah gapai mimpimu, teruslah berusaha, teruslah maju, setiap cobaan  
pasti akan ada jalan keluarnya, kata "MENYERAH" hanya untuk  
orang-orang yang lemah. Kesuksesan bukan seberapa banyak harta  
yang kamu punya, tapi menjadi berguna dan bermanfaat untuk  
banyak orang itu adalah kesuksesan sebenarnya.**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG**". Skripsi ini penulis selesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Strata 1 pada Program Studi Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam segala hal yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini dan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis menjalani masa kuliah sehingga berhasil menyelesaikan studinya. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus serta rasa hormat kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA., selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Ak., Ak., CA., selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang serta selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, membimbing dan memberikan kritik serta saran membangun demi selesainya skripsi ini.



3. Ibu Sri Kurnia, S.E., M.Ak., Ak., CA., selaku Wakil Ketua II dan sebagai Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Imran Ilyas, M.M., selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Hendy Satria, S.E., M.Ak., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang serta selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, membimbing dan memberikan kritik serta saran membangun demi selesainya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang memberikan ilmu dan dukungan.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah bersedia memberikan izin serta ilmu dalam penelitian ini.
8. Ibu Syarifah Umami Kalsum selaku Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan beserta staff yang memberikan ilmu serta bimbingan dalam penelitian ini.
9. Almarhum kedua orangtua tercinta serta Almarhum adik tersayang yang sudah berada di Surga Allah SWT.
10. Keluarga tercinta suamiku Achmad Hariyanto, anakku tercinta Arkanza Xaquille Satriaaji, abg tersayang Yoga Pratama Putra,SH , kakak ipar sayang Febriyanti Rahmi Putri, SE , anakku Arsakha Grawira Pratama, yang selalu mendoakan, memotivasi, memberi kasih sayang dan memberikan dukungan

dari materi hingga non materi, sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

11. Keluarga kedua ibu tersayang Lina Lusiana S.Ap, MH , kakak tersayang Cici Yulia Lestari,SE , dan sahabat tercinta Dinda Wikal Dayanti Tanjung, SE yang selalu memberikan support dan motivasi.

12. Seluruh pihak yang telah membantu dan memotivasi penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan. Oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penelitian yang akan datang. Semoga tugas akhir skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Tanjungpinang, 21 Januari 2021

Penulis

**CINTHIA CHRISTY**  
NIM : 16622080

## DAFTAR ISI

HAL

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b>	
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	
<b>HALAMAN MOTTO</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Pembatasan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Realisasi Kerja dan Anggaran.....	8
2.1.1 Pengertian.....	8
2.1.2 Sistem Penganggaran.....	10
2.1.3 Tujuan.....	11
2.1.4 Manfaat.....	12
2.1.5 Fungsi.....	14
2.1.6 Jenis-Jenis Anggaran.....	16
2.1.6 Siklus Anggaran.....	18
2.1.7 Penyusunan RKA-SKPD.....	19
2.1.8 Prinsip-Prinsip.....	21

2.2 Laporan Realisasi Anggaran.....	29
2.3 Kerangka Pemikiran.....	32
2.4 Penelitian Terdahulu .....	33
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Jenis Data.....	36
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.4 Teknik Analisis Data dan Pengolahan Data .....	38
3.6 Lokasi Penelitian.....	39
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	40
4.1.1 Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang .....	40
4.1.2 Analisis Data .....	53
4.2 Pembahasan .....	54
4.2.1 Proses Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran .....	54
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	
<b><i>CURICULUM VITAE</i></b>	

## **DAFTAR TABEL**

<b>No.</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.	Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung.....	56
2.	Rekapitulasi Anggaran Belanja Tidak Langsung.....	58
3.	Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja SKPD.....	60
4.	Perbandingan Harga Satuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Standar Satuan Harga(SSH).....	62

## DAFTAR GAMBAR

<b>No.</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1.	Kerangka Pemikiran .....	32
2.	Struktur Organisasi Diskominfo Kota Tanjungpinang.....	42

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020
- Lampiran 2 Surat Rekomendasi Penelitian
- Lampiran 3 Lembar *Plagiarism*
- Lampiran 4 *Curriculum Vitae*

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG**

Cinthia Christy, 1622080, Akuntansi, STIE Pembangunan Tanjungpinang

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang serta mengetahui kesesuaian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dengan peraturan yang berlaku.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan menggunakan data sekunder berupa laporan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang. Analisis data yang digunakan yaitu proses penyusunan Rencana kerja dan Anggaran serta kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran belum sesuai, banyak kekurangan yang menjadi masalah baik dari internal maupun eksternal. Untuk kesesuaian dengan peraturan yang berlaku Dinas Komunikasi dan Informatika sudah sesuai tetapi masalah yang terjadi peraturan yang terus berubah menjadi kendala dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.

Kata Kunci : rencana kerja dan anggaran, proses penyusunan, peraturan yang berlaku

Referensi : 12 Buku (2010-2019) + 5 Jurnal + 1 Peraturan Pemerintah  
Dosen Pembimbing I : Ranti Utami, S.E., M.Ak., Ak., CA  
Dosen Pembimbing II : Hendy Satria, S.E., M.Ak



## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF PREPARATION OF WORK PLAN AND BUDGET IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATION AND INFORMATICS, TANJUNGPINANG CITY**

Cinthia Christy, 1622080, *Accounting*, STIE Pembangunan Tanjungpinang

*The purpose of this research is to analyze the process of preparing the Work Plan and Budget at the Office of Communication and Information of the City of Tanjungpinang and to find out the suitability of the preparation of the Work Plan and Budget of the Office of Communication and Informatics of the City of Tanjungpinang with the applicable regulations.*

*The method used in this research is descriptive qualitative and uses secondary data in the form of a 2020 Work Plan and Budget report at the Office of Communication and Information of Tanjungpinang City. The data analysis used is the process of preparing the work plan and budget and compliance with applicable regulations.*

*The results showed that the work plan and budget formulation process was not appropriate, many deficiencies became problems both internally and externally. For compliance with applicable regulations, the Communication and Information Technology Office is appropriate, but problems that occur in regulations that continue to change become obstacles in the preparation of Work Plans and Budgets.*

*Keywords: work plan and budget, drafting process, applicable regulations*

*Reference: 12 Books (2010-2019) + 5 Journals + 1 Government Regulation  
Supervisor I: Ranti Utami, S.E., M.Ak., Ak., CA  
Supervisor II: Hendy Satria, S.E., M.Ak*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Anggaran dapat diartikan sebagai suatu rencana jangka pendek sebuah organisasi yang dapat dinyatakan dalam istilah keuangan. Anggaran tersebut ditampilkan dan disajikan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pendapatan, belanja, surplus / defisit, pembiayaan, serta rencana kerja yang akan dilaksanakan dan kreativitas.

Pembangunan di daerah menjadi salah satu indikator atau penunjang demi terwujudnya pembangunan di Negeri ini. Oleh karena itu, pemerintah pusat telah merumuskan kebijakan tentang pemerintah daerah yang memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengurus keluarganya sendiri.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah dan DPR daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap anggaran pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah. Dengan perkembangan manajemen keuangan, banyak perubahan yang terjadi, dan format laporan keuangan mengalami perubahan besar, antara lain pada era pra reformasi.

Pengalokasian dana pemerintah daerah perlu diumumkan kepada publik. Tujuannya untuk meningkatkan transparansi publik, memberikan informasi kepada publik, dan meningkatkan akuntabilitas publik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tersebut tidak memiliki cacat dan tidak akan menyebabkan penyalahgunaan anggaran sehingga berkontribusi pada perekonomian, sosial dan politik. Keputusan memberikan informasi, dan juga dapat memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajemen organisasi atau perusahaan.

Rencana kerja dan anggaran (RKA) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah memberikan informasi yang berguna untuk menilai kinerja keuangan daerah. RKA merupakan salah satu kerangka utama pelaporan keuangan daerah, karena anggaran pemerintah merupakan kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran merupakan sarana penting untuk menstabilkan, mengalokasikan, mengalokasikan sumber daya publik, mengelola rencana dan kendali, dan mengevaluasi kinerja.

Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) memiliki kedudukan prioritas yang lebih penting sebagai persyaratan, dijadikan sebagai syarat utama yaitu laporan keuangan daerah yang disusun sebagai persyaratan, dibuat terlebih dahulu, kemudian digabungkan menjadi satu dan disusun menjadi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota

Tanjungpinang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang informasi dan komunikasi yang menjadi kewenangan daerah.

Penyusunan APBD merupakan rencana jangka pendek, penjabaran dari rencana jangka menengah, dan bagian dari rencana jangka panjang. Penyusunan APBD merupakan proses anggaran daerah, secara konseptual meliputi penyusunan kebijakan anggaran dan rencana operasi anggaran. Sebagai bagian dari kebijakan anggaran, pemerintah daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) tahun anggaran berikutnya dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) kepada DPRD. Penyusunan kebijakan umum APBD termasuk kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran. Formulasi kebijakan anggaran berkaitan dengan analisis fiskal, sedangkan perencanaan operasional anggaran lebih ditekankan pada alokasi sumber daya keuangan. Kemudian, KUA dan PPAS yang telah mencapai kesepakatan dengan DPRD digunakan sebagai pedoman perencanaan operasi anggaran, dalam hal ini penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja (RKA) merupakan dokumen yang digunakan untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah yang antara lain memuat rencana program dan kegiatan, serta anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Perangkat Daerah. RKA juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan

dicapai dari program dan kegiatan.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih baik. Yaitu bukan sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien dan efektif.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti terdapat fenomena yaitu dalam tahapan penyusunan RKA, dari peraturan yang terus berubah tiap tahunnya banyak juga perubahan yang terjadi tidak sesuai dengan rancangan awal penentuan KUA dan PPAS, karena pada tiap tahapan penyusunan tiap OPD wajib menyampaikan RKA yang telah disusun kepada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) melalui SiMDA selanjutnya BPKAD menyampaikan ke DPRD dan disinilah biasanya terjadi ketidaksesuaian dengan apa yang sudah direncanakan.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses penyusunan rencana kerja dan anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang?
2. Apakah dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah peneliti hanya melakukan penelitian penyusunan RKA pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang hanya 1 periode yaitu realisasi anggaran tahun 2020.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis proses penyusunan rencana kerja anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.
2. Mengetahui kesesuaian penyusunan Rencana kerja dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Tanjungpinang dengan peraturan yang berlaku.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Bagi Pemerintah Daerah**

Dapat digunakan sebagai bahan koreksi untuk meningkatkan kinerja keuangan pada tahun berikutnya.

### **1.5.2 Bagi Akademis**

Hasil penelitian ini dapat memberi masukan bagi pihak-pihak yang ingin memperdalam pengetahuan tentang perkembangan kinerja keuangan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.

### **1.5.3 Bagi Peneliti Selanjutnya**

Dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya yang meneliti pada bidang yang sama.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II      TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi dasar analisis penelitian yang meliputi: Realisasi Kinerja dan Anggaran (RKA) , rencana kerja pemerintah daerah, dan tinjauan penelitian terdahulu.

## **BAB III     METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

## **BAB IV     HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penulis akan menyampaikan hasil dari analisis data yang telah dilakukan, kemudian menguraikan, dan memberikan penjelasan analisisnya secara keseluruhan.

## **BAB V      PENUTUP**

Penulis akan merangkum secara keseluruhan bab yang kemudian menjadi kesimpulan dan menyampaikan saran-saran yang ditujukan kepada instansi yang diteliti dan juga kepada peneliti selanjutnya.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Realisasi Kerja dan Anggaran**

##### **2.1.1 Pengertian**

Menurut pendapat Jhon F.Due mengemukakan bahwa anggaran merupakan “*A budget, in the general sense of the term, is a financial plan for specific period of time. A government budget therefore, is a statement of proposed expenditures and expected revenues for coming period, together with data of actual expenditure and revenues for current and past period*”

J.Burkhead dan J.Minar dalam bukunya *Public Expenditure*, menjelaskan bahwa Anggaran merupakan suatu kondisi dimana mengacu pada rencana anggaran pemerintah yang telah dirumuskan selama masa periode anggaran tahun buku, dan harus dikaitkan dan dihubungkan dengan item anggaran yang lebih panjang.

Anggaran negara adalah suatu strategi yang dibutuhkan untuk mendanai setiap kegiatannya, begitu pula biaya yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan pemerintahan harus jelas taksiran pemasukan dan pengeluarannya dalam hal ini dalam bukunya *Hukum Keuangan Negara RI* oleh (M.Soebagio).

Dalam bukunya *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek* (M.Suparmoko) menyebutkan bahwa anggaran merupakan suatu daftar

anggaran atau pernyataan yang sudah dirincikan oleh suatu kelompok dengan sedemikian rupa dan dianggarkan dalam waktu periode penggunaan anggaran satu tahun.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pada saat yang sama, anggaran fiskal tahunan pemerintah daerah disetujui oleh kongres rakyat daerah. (Kamaroesid, 2013)

Anggaran adalah sebagai pernyataan perkiraan kinerja yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu yang ditunjukkan dalam indikator keuangan, dan penyusunan anggaran sehingga anggaran dan laporan anggaran dapat disusun pernyataan tersebut dikutip dari buku *Akuntansi Sektor publik*.(Nordiawan, Deddi Hertianti, 2010)

Dalam buku *Pengelolaan Keuangan Daerah* edisi ketiga menyatakan bahwa Anggaran adalah sebuah rencana yang telah disusun dalam bentuk kuantitatif kedalam satuan moneter untuk satu periode anggaran. Periode anggaran biasanya digunakan untuk anggaran dalam jangka waktu setahun.(Halim, Abdul Iqbal, 2012)

Anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemah berbagai program ke dalam rencana keuangan tahunan yang

lebih kongkret. Dalam penyusunan anggaran pada organisasi sektor publik dapat membantu mewujudkan akuntabilitas. Di dasari anggaran yang telah ditetapkan, dalam hal ini masyarakat secara tidak langsung dapat melakukan pengawasan atau pengendalian. (Mahsun.Mohamad, 2016)

### **2.1.2 Sistem Penganggaran**

Penyusunan anggaran dalam laporan realisasi anggaran merupakan bagian dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Penyusunan APBN antara lain persiapan dokumen RKA, termasuk rencana belanja fiskal nasional (RDP-Bendahara Negara). Anggaran berbeda dengan bendahara negara , maka dokumen anggaran dalam penyusunan anggaran pemerintah dibedakan menjadi:

1. Laporan realisasi anggaran adalah dokumen rencana keuangan tahunan Perangkat Daerah yang disusun menurut Bagian Anggaran.
2. RDP-Bendahara Negara adalah laporan realisasi anggaran Bagian Anggaran Bendahara Negara, yang memuat informasi rinci tentang penyediaan dana berupa anggaran belanja dan pembiayaan untuk memenuhi kewajiban pemerintah pusat, dan dialihkan ke wilayah pengelolaan dimana Presiden telah memberikan wewenang kepada Sekretaris Perbendaharaan untuk menjabat sebagai bendahara negara. . (kamaroesid, 2013)

Anggaran diperlukan oleh sebuah Negara dan biaya pembangunan untuk kesejahteraan rakyatnya. Dengan berlakunya amandemen terhadap undang-undang Dasar 1945 telah terjadi perubahan dalam pengelolaan administrasi dan pembangunan yaitu :

1. Penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Ditiadakannya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan Nasional.
3. Diperkuatnya Otonomi Daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan republik Indonesia. (Kamaroesid, 2013)

Dalam pengertian lain anggaran dapat dikatakan sebagai sebuah rencana finansial yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Rencana dalam organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.
2. Perkiraan besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut
3. Perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta besarnya pemasukan tersebut.(Nordiawan, Deddi Hertianti, 2010)

### **2.1.3 Tujuan**

Sasaran standar dari laporan realisasi anggaran adalah untuk memberikan dasar kepada pemerintah terutama pemerintah daerah tentang laporan realisasi anggaran , yang digunakan untuk mencapai tujuan akuntabilitas yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.(IKAPI, 2011)

Tujuan laporan realisasi anggaran adalah untuk memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelapor. Perbandingan anggaran dan realisasinya menunjukkan sejauh mana tujuan yang telah disepakati oleh lembaga

legislatif dan lembaga pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah tercapai. (Mahmudi, 2016)

#### **2.1.4 Manfaat**

Laporan realisasi anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, pengeluaran, transfer, surplus / defisit dan pembiayaan entitas pelapor, dan membandingkan setiap item dengan anggaran. Informasi ini sangat berguna bagi pengguna pelaporan untuk mengevaluasi keputusan tentang alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas entitas pelaporan, dan kepatuhan anggaran dengan cara-cara berikut :

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
- b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus/defisit
- e. Penerimaan pembiayaan

- f. Pengeluaran pembiayaan
- g. Pembiayaan neto, dan
- h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

(2013)

#### **2.1.4.1 Manfaat Informasi**

Laporan realisasi anggaran memberikan informasi tentang pendapatan pengeluaran, transfer, surplus / defisit dan realisasi pembiayaan entitas pelapor, dan membandingkan setiap item dengan anggarannya. Informasi ini sangat berguna bagi pengguna pelaporan untuk mengevaluasi keputusan tentang alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas entitas pelaporan, dan kepatuhan anggaran dengan cara-cara berikut :

1. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi
2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan realisasi anggaran memberikan informasi yang berguna untuk memprediksi sumber daya ekonomi yang akan mendanai kegiatan suatu instansi dan daerah di masa mendatang dengan memperkenalkan laporan secara komparatif. Menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi jika telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD) dan telah dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. (Mahmudi, 2016)

### **2.1.5 Fungsi**

Dalam ruang lingkup akuntansi, anggaran berada dalam lingkup akuntansi manajemen. Berikut beberapa fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik.

#### **1. Anggaran sebagai alat perencanaan**

Dengan anggaran, organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan tersebut.

#### **2. Anggaran sebagai alat pengendalian**

Anggaran organisasi sektor publik dapat menghindari pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (*misspending*).

#### **3. Anggaran sebagai alat kebijakan**

Arah atas kebijakan tertentu dapat ditentukan melalui anggaran organisasi sektor publik.

#### **4. Anggaran sebagai alat politik**

Dalam organisasi sektor publik, komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan dapat dilihat melalui anggaran.

#### **5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi**

Melalui dokumen anggaran yang lengkap, sub organisasi atau unit kerja

atau departemen dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan unit kerja lain.

#### 6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja

Anggaran berupa kegiatan atau pemenuhan cost-effective, dan dapat dijadikan patokan untuk mengukur apakah bagian / unit kerja telah mencapai target.

#### 7. Anggaran sebagai alat motivasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan menetapkan nilai nominal (dicantumkan dan dimasukkan sebagai hasil.(Nordiawan, Deddi Hertianti, 2010)

### **2.1.5.1 Fungsi Terkait Penyusunan RKA-SKPD**

1. Perangkat Daerah
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

#### PROSEDUR

1. Perangkat Daerah pemungutan pendapatan menyusun perincian anggaran pendapatan.
2. Perangkat Daerah menyusun perincian anggaran belanja tidak langsung.
3. Perangkat Daerah menyusun perincian Anggaran Belanja langsung setiap kegiatan.
4. Perangkat Daerah yang bertindak sebagai SKPKD menyusun perincian penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.



5. Perangkat Daerah mengompilasi dokumen RKA.
6. Perangkat Daerah menyerahkan dokumen RKA kepada PPKD untuk proses penyusunan Raperda APBD. (Hariadi, Pramono Restianto, Yanuar E Bawono, 2010)

Berdasarkan UU No.33 tahun 2004 pasal 66 ayat 1, keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Dari struktur pengelolaan keuangan Daerah dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan interpretasi dari rencana operasional yang diturunkan dari rencana strategi organisasi. (Halim, Abdul Iqbal, 2012)

#### **2.1.6 Jenis-Jenis Anggaran**

1. Anggaran operasional dan anggaran modal (*Current Vs Capital Budget*)

Anggaran operasional dalam hal ini digunakan untuk perencanaan suatu kebutuhan operasional harian selama satu tahun. Anggaran operasional biasanya diklasifikasikan sebagai pengeluaran pendapatan, yaitu pengeluaran konvensional atau belanja rutin yang tidak besar dan tidak dapat meningkatkan fungsi aset.

Anggaran modal (*capital budget*) menunjukkan suatu rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap, seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah

jumlah aset atau kekayaan organisasi sektor publik, yang selanjutnya akan menambah anggaran operasional untuk biaya pemeliharannya.

## 2. Anggaran berdasarkan pengesahan (*Tentative Enacted Budgets*)

Menurut status hukumnya, terbagi menjadi dua bagian yaitu anggaran tentatif, yang tidak memerlukan persetujuan legislatif karena kemunculannya dipicu oleh kejadian yang sebelumnya tidak direncanakan. Sedangkan anggaran yang dirumuskan merupakan anggaran yang direncanakan, yang kemudian dibahas oleh legislatif.

## 3. Anggaran dana umum vs anggaran dana khusus (*General Vs Special Budget*)

Dalam pemerintahan, kekayaan negara (dana) menjadi dana umum yang digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintahan umum dan sehari-hari, sedangkan dana khusus dicadangkan / dialokasikan untuk tujuan tertentu tertentu, seperti dana layanan hutang yang diperuntukkan untuk pembayaran kembali hutang.

## 4. Anggaran tetap vs anggaran fleksibel (*Fixed Vs Flexible Budget*)

Dalam anggaran tetap, besarnya alokasi belanja ditentukan pada awal tahun anggaran. Jika total kegiatan yang dilakukan bertambah, tidak boleh melebihi jumlah tersebut. Dalam anggaran yang fleksibel, harga per unit barang / jasa ditetapkan. Namun jumlah total anggaran akan berfluktuasi sesuai dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

## 5. Anggaran eksekutif vs anggaran legislatif (*Executive Vs Legislative Budget*)

Menurut perumusan anggaran, anggaran dapat dibagi menjadi anggaran administrasi dan anggaran legislatif. Anggaran administrasi adalah anggaran yang disiapkan oleh badan administrasi (dalam hal ini pemerintah), dan anggaran legislatif, yaitu badan legislatif yang menyiapkan anggaran tanpa melibatkan tenaga administrasi. Anggaran. (Nordiawan, Deddi Hertianti, 2010)

### **2.1.6 Siklus Anggaran**

Pembuatan anggaran adalah suatu proses yang berkelanjutan. Pada organisasi sektor publik, susunan anggaran umumnya melewati lima tahapan.

#### **1. Persiapan (*Preparation*)**

Dalam siklus ini anggaran menyiapkan format anggaran yang akan dipakai. Setiap pemerintahan mengajukan anggaran yang selanjutnya akan dikonsolidasikan oleh bagian anggaran.

#### **2. Persetujuan lembaga legislatif (*Legislative Enactment*)**

Anggaran telah diserahkan ke legislatif untuk disetujui. Badan legislatif kemudian akan memahasnya untuk mendapatkan pertimbangan persetujuan atau penolakan anggaran. Selain itu, akan dilakukan dengan dengar pendapat (*public hearing*) sebelum legislatif menyetujui atau menolaknya.

#### **3. Administrasi (*Administration*)**

Setelah anggaran disahkan, ia mulai melaksanakan anggaran, yang tidak hanya mengumpulkan pendapat yang ditargetkan tetapi juga melaksanakan pengeluaran yang direncanakan. Pada tahap implementasi ini juga dilaksanakan proses pengelolaan anggaran berupa pencatatan pendapatan dan pengeluaran yang terjadi.

#### 4. Pelaporan (*Reporting*)

Laporan tersebut selalu diselesaikan pada akhir periode atau pada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari perlakuan akuntansi dalam proses pelaksanaannya.

#### 5. Pemeriksaan (*Post-Audit*)

Laporan yang telah diberikan atas pelaksanaan anggran diperiksa (diaudit) oleh sebuah lembaga pemeriksa independen, dan hasil pemeriksaan akan menjadi masukan atau umpan balik (feedback) untuk proses penyusunan pada periode berikutnya. (Nordiawan, Deddi Hertianti, 2010)

### **2.1.7 Penyusunan RKA-SKPD**

Deskripsi kegiatan :

1. Kepala Perangkat Daerah menyusun RKA berdasarkan pedoman penyusunan RKA.
2. RKA Menggunakan metode kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran dan penganggaran yang komprehensif berdasarkan kinerja.
3. Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah menerapkan prakiraan berwawasan ke depan, yang mencakup perkiraan kebutuhan anggaran untuk kegiatan yang direncanakan pada tahun fiskal berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, dan menyiratkan bahwa dana diperlukan untuk melaksanakan rencana dan kegiatan tersebut di tahun berikutnya.
4. Dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran ke dalam Perangkat Daerah untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan

anggaran, maka metode penganggaran yang komprehensif dapat diterapkan.(IKAPI, 2011)

Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Negara/Daerah Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Selain penerimaan, sejumlah pengeluaran juga dikeluarkan yang diakui pada saat bersumber dari rekening kas umum negara / daerah. Khusus untuk pengeluaran yang melewati Kementerian Keuangan, ketika unit dengan fungsi fiskal menyetujui tanggung jawab untuk pengeluaran tersebut, terjadi konfirmasi pengeluaran. Pada badan layanan publik, pengeluaran dikonfirmasi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait badan layanan publik.

Pembiayaan (*Financing*) adalah Semua transaksi keuangan pemerintah yang membutuhkan penerimaan dan pengeluaran, termasuk didalamnya penerimaan dan pengeluaran, akan dipulihkan, terutama digunakan dalam anggaran pemerintah untuk menutupi defisit dan / atau menggunakan surplus anggaran. Pendapatan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pada saat yang sama, pengeluaran pembiayaan, antara lain, digunakan untuk membayar kembali pokok pinjaman, memberikan pinjaman kepada entitas lain, dan berpartisipasi dalam modal pemerintah.(Mahmudi, 2016)

### 2.1.8 Prinsip-Prinsip

SAP AkruaI (Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010) Prinsip-prinsip akuntansi pendapatan Daerah Prinsip ini dapat diikhtisarkan sebab :

1. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Pendapatan diakui pada saat :
  - a. Diterima pada Rekening Kas Umum Daerah; atau
  - b. Diterima oleh Perangkat Daerah; atau
  - c. Diterima oleh entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD.
3. Pendapatan diklasifikasikan menurut kelompok/jenisnya. Masing-masing jenis pendapatan dapat dirinci berdasarkan objek dan rincian objek pendapatan.
4. Transfer masuk (pendapatan transfer) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat, dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Pendapatan transfer diakui pada saat transfer telah diterima di rekening Kas Umum Daerah.
5. Akuntansi pendapatan didasarkan pada prinsip umum, yaitu total pendapatan dicatat tanpa mencatat jumlah bersih (setelah dikompensasikan dengan biaya).
6. Jika pengurangan pendapatan total (biaya) adalah variabel relatif terhadap

pendapatan yang dinyatakan dan tidak dapat dianggarkan sebelumnya karena prosesnya belum selesai, prinsip umum dapat dikecualikan.

7. Jika pendapatan tunai dari pendapatan mencerminkan kegiatan pihak-pihak selain pemerintah daerah, atau pendapatan tunai berasal dari perputaran cepat, volume transaksi besar dan transaksi waktu singkat, prinsip umum dapat menjadi pengecualian.
8. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
9. Pengembalian pendapatan sistematis (normal) dan berulang (misalnya, pengembalian pajak) yang diterima selama periode penerimaan dan periode sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan.
10. Koreksi dan pengembalian yang tidak berulang (*non-recurring*) dari pendapatan yang terjadi selama periode yang sama ketika pendapatan diterima. Apabila laporan keuangan tahun tersebut belum dipublikasikan (masih dalam proses persiapan / pemeriksaan), ketentuan ini berlaku juga untuk koreksi kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya.
11. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak dapat diulang atau tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan suatu pendapatan yang terjadi pada masa periode sebelumnya (jika laporan keuangan tahun yang bersangkutan telah diterbitkan atau disampaikan kepada Dewan Perwakilan Daerah) dibukukan sebagai pengurangan Saldo Anggaran Lebih (SiLPA) pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

### **2.1.8.1 Prinsip-prinsip Akuntansi Belanja Daerah**

Prinsip-prinsip akuntansi belanja dapat diikhtisar sebagai berikut:

1. Belanja daerah mengacu pada semua belanja yang berasal dari buku besar daerah, yang akan mengurangi kelebihan saldo anggaran (SiLPA) yang tidak dapat dikembalikan pemerintah pada tahun anggaran yang bersangkutan.
2. Pengeluaran tersebut dikonfirmasi ketika dibayar dari buku besar daerah. Khusus untuk belanja yang dihasilkan melalui bendahara belanja, apabila tanggung jawab belanja tersebut disahkan oleh unit atau pengguna anggaran yang menjalankan fungsi fiskal (BUD) (tergantung kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah di pusat).
3. Sejauh menyangkut badan layanan publik, pengeluaran dikonfirmasi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait badan layanan publik.
4. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi belanja menurut jenisnya, dapat dirinci lebih lanjut berdasarkan objek dan rincian objek belanja.
5. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan pengeluaran menurut jenis pengeluaran yang dilakukan. Klasifikasi ekonomi pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan distribusi, bantuan keuangan, bagi hasil dan belanja tak terduga.
6. Klasifikasi kelompok (klasifikasi di dalam format APBD) adalah pengelompokan belanja di dalam APBD berdasarkan Permendagri 13/2006 dan perubahannya, yang terdiri dari belanja tidak langsung dan



belanja langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan program atau kegiatan, terdiri dari contoh : belanja gaji/tunjangan, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, bagi hasil, dan belanja tak terduga. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan adanya program atau kegiatan, terdiri dari : belanja pegawai selain gaji dan tunjangan (berupa honor-honor), belanja barang dan belanja modal.

7. Belanja operasional (klasifikasi dalam SAP) mengacu pada belanja anggaran kegiatan sehari-hari pemerintah pusat / daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Pengeluaran bisnis meliputi pengeluaran pegawai, pengeluaran material, bunga, subsidi, subsidi, dan bantuan sosial.
8. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan atau renovasi aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal untuk perolehan atau renovasi aset tetap meliputi belanja modal tanah; gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; irigasi dan jaringan; dan aset tetap lainnya. Contoh belanja modal untuk aset lainnya adalah perolehan software aplikasi komputer yang biasanya diberi secara terpisah dari komputernya (aset tak berwujud), seperti software aplikasi akuntansi, perbendaharaan, dsb.
9. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan terjadi lagi, seperti bencana alam, pengeluaran sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang penting untuk menjalankan kewenangan pemerintah daerah.

10. Transfer keluar adalah Belanja entitas pelapor kepada entitas pelapor lainnya, seperti belanja modal neraca pemerintah pusat, bagi hasil / transfer bantuan keuangan dari satu pemerintah daerah ke daerah lain.

#### Prinsip-prinsip akuntansi pembiayaan daerah

Akun pembiayaan hanya ada di LRA sementara di LO tidak ada . karena LO hanya melapor transaksi yang sifatnya pendapatan dan beban sedangkan pembiayaan itu bukan pendapatan melainkan beban. Ikhtisar LRA adalah :

1. Pembiayaan (*Financing*) adalah Pada tahun fiskal yang relevan dan tahun-tahun fiskal berikutnya, setiap pendapatan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran untuk dipulihkan sebagian besar berasal dari anggaran pemerintah untuk menutupi defisit atau menggunakan surplus anggaran.
2. Pembiayaan diklasifikasikan kedalam dua kelompok yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
3. Penerimaan pembiayaan adalah Semua pendapatan yang berasal dari rekening kas daerah biasa antara lain mencakup pendapatan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, privatisasi BUMN / daerah, pendapatan pinjaman kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan belanja cadangan.
4. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
5. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan mencatat pendapatan total, tanpa mencatat jumlah bersih (setelah dikurangi biaya).

6. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran dalam buku besar daerah, termasuk pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam tahun anggaran tertentu, dan pembentukan cadangan.
7. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
8. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.  
(Mulyana, 2014)

Pemerintah daerah biasanya menetapkan tujuan dasar dalam rencana yang luas dan berjangka panjang untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dasar dan sasaran fungsinya adalah sebagai pedoman untuk menyusun perencanaan yang bersifat teknis untuk mencapainya (perencanaan operasional).

Perencanaan operasional umumnya merupakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berikut target kinerja yang akan dicapai. Perencanaan operasional memuat alternatif program dan kegiatan yang dipertimbangkan sebagai cara untuk mencapai tujuan dasar dan sasaran yang diinginkan. Perencanaan operasional dirumuskan dalam jangka pendek selanjutnya diidentifikasi dan diekspresikan dalam [ukuran satuan uang pada tahap penganggaran.

Pengendalian dilakukan dengan membandingkan anggaran dan realisasinya. Dalam pengeluaran daerah pengendalian belanja daerah perlu ditentukan untuk

dapat dipastikan apakah: 1) realisasi belanja atau jumlah belanja tidak melebihi jumlah anggaran; 2) apakah tingkat kegiatan yang direncanakan dapat tercapai.

Penyusunan laporan meliputi anggaran pendapatan dan belanja dan realisasinya, serta selisih rencana dan realisasi. Analisis perbedaan untuk menentukan penyebabnya. Hasil analisis sebagai dasar untuk memberikan alternatif umpan balik untuk tahapan aktivitas sebelumnya dalam siklus perencanaan dan pengendalian meliputi revisi perencanaan operasional, revisi anggaran atau modifikasi terhadap tujuan dasar dan sasaran.

Anggaran dibagi menjadi 2 komponen menurut (*Horngren, Sundem And Stratton, 2002*) yaitu anggaran operasi (*Operating Budget*) dan anggaran keuangan (*Financial Budget*). Anggaran operasi lebih terfokus pada laporan laba-rugi dan pendukungnya, oleh karenanya disusun sedemikian rupa sehingga memperlihatkan target-target pendapatan dan perkiraan biaya-biaya dalam periode mendatang. (Halim, Abdul Iqbal, 2012)

Struktur laporan realisasi anggaran dijelaskan dalam PSAP Nomor 02 paragraf 9 dan 10, yaitu laporan realisasi anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus / defisit, dan pembiayaan, dibandingkan dengan anggaran selama periode waktu tertentu, dan laporan realisasi anggaran harus diidentifikasi secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan. (Tanjung, 2011)

Perencanaan anggaran daerah (APBD) terdiri dari formulasi kebijakan anggaran adalah penyusunan arah dan kebijakan umum APBD sebagai dasar dalam perencanaan operasional. Perencanaan operasi merupakan penyusunan

rencana kegiatan alokasi sumber daya.

### 1. Formulasi Kebijakan Anggaran

Formulasi kebijakan anggaran ditetapkan pada arah dan kebijakan umum APBD. Berdasarkan peraturan pemerintah No.105 tahun 2000 anggaran APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi atau input yang ditetapkan.

### 2. Perencanaan Operasional Anggaran.

Perencanaan operasional anggaran berkaitan dengan penyusunan rencana kegiatan dan alokasi sumber daya dengan mengacu pada arah dan kebijakan umum APBD.

Kepala Daerah menetapkan rencana anggaran satuan kerja (RASK) sebagai dokumen anggaran satuan kerja sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dokumen anggaran satuan kerja berisi tentang pendapatan dan belanja masing-masing perangkat daerah, yang digunakan oleh pengguna anggaran sebagai dasar pelaksanaan "APBD". Kepala daerah juga menetapkan penjabaran APBD. Penjabaran APBD ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun anggaran kas.

Analisis varians anggaran adalah teknik pengukuran kinerja tradisional yang dapat membandingkan anggaran dan implementasi, terlepas dari keberhasilan program, yaitu terjadi *over spending* atau *under spending*. Pengukuran kinerja berbasis anggaran dilakukan dengan menilai selisih (*variance*) antara

anggaran dengan realisasinya. Teknik tersebut lebih dikenal dengan istilah analisis anggaran (*Analysis of Budget Variance*). (Mahsun.Mohamad, 2016)

## **2.2 Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan realisasi anggaran terdiri atas enam elemen (pos) utama yaitu :

### **1.Pendapatan**

Pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan transfer meliputi transfer :

1. pemerintah pusat berupa dana perimbangan, dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum dan khusus.
2. Transfer pemerintah pusat lainnya yaitu dana otonomi khusus dan dana penyesuaian.
3. Transfer pemerintah provinsi (khusus untuk pemerintah kabupaten kota) yaitu pendapatan bagi hasil pajak dan pendapatan bagi hasil lainnya. Lain – lain pendapatan yang sah meliputi pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, pendapatan lainnya.

### **2.Belanja**

Pos belanja diklasifikasi menjadi tiga yaitu:

1. Belanja operasi yaitu belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

2. Belanja modal yaitu belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya.
3. Belanja tak terduga yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak berulang atau rutin terjadi yaitu bantuan bencana alam, bantuan bencana sosial, bantuan korban politik.

### **3. Belanja Transfer**

Belanja transfer merupakan bagian dari belanja pemerintah daerah. Untuk pemerintah provinsi pengeluaran transfer berupa transfer/ bagi hasil pendapatan ke kabupaten / kota yang meliputi bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi, bagi hasil pendapatan lainnya.

### **4. Surplus Atau Defisit**

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode anggaran, sedangkan defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja selama satu periode anggaran.

### **5. Pembiayaan**

1. Penerimaan pembiayaan yang terdiri atas
  - a. Penggunaan SiLPA tahun lalu.
  - b. Pencairan dana cadangan.
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
  - d. Pinjaman dalam negeri kepada pemerintah pusat.

- e. Pinjaman dalam negeri kepada pemerintah daerah lainnya.
- f. Pinjaman dalam negeri kepada lembaga keuangan bank.
- g. Pinjaman dalam negeri kepada lembaga keuangan bukan bank.
- h. Pinjaman dalam negeri – pengeluaran obligasi pemerintah daerah.
- i. Pinjaman dalam negeri lainnya.
- j. Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara.
- k. Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan daerah.
- l. Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya.
- 2. Pengeluaran pembiayaan terdiri atas
  - a. Pembentukan dana cadangan.
  - b. Penyertaan modal daerah.
  - c. Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri kepada pemerintah pusat.
  - d. Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri kepada pemerintah daerah lainnya.
  - e. Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri kepada lembaga keuangan bank.
  - f. Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri kepada lembaga keuangan bukan bank.
  - g. Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri – obligasi pemerintah pusat.
  - h. Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri – lainnya.
  - i. Pemberian pinjaman kepada perusahaan negara.
  - j. Pemberian pinjaman kepada perusahaan daerah.



k. Pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya.

#### 6.SiLPA atau SiKPA.

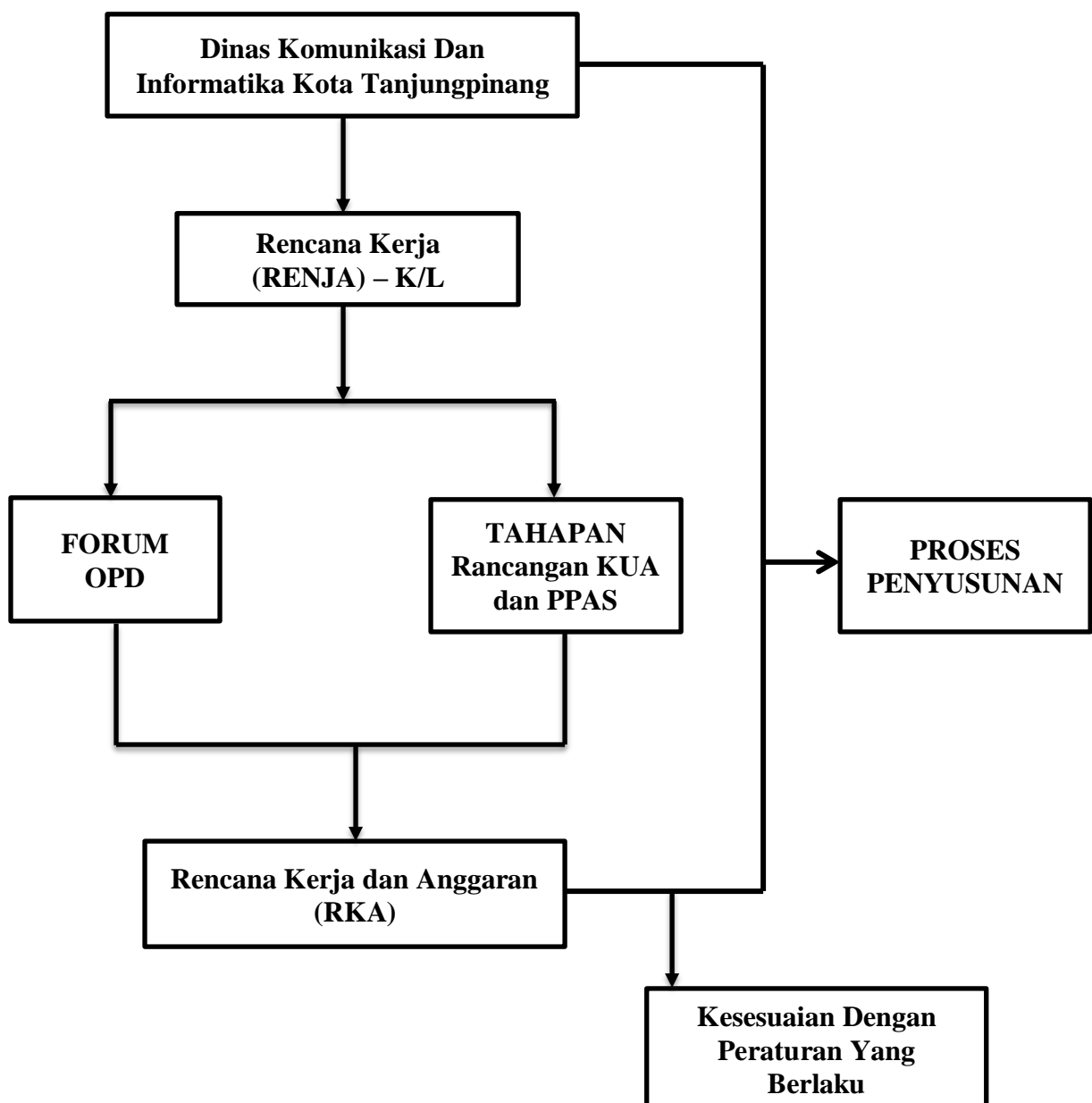
Surplus / surplus anggaran adalah selisih antara realisasi pendapatan dan belanja daerah selama periode anggaran. SiLPA atau SiKPA dapat dihitung dengan menambahkan nilai item surplus / defisit ke item pembiayaan neto.

(Mahmudi, 2016)

**Gambar 2.3**

#### **Kerangka Pemikiran**

*SUMBER : Konsep yang disesuaikan dengan peneliti(2020)*



## 2.4 Penelitian Terdahulu

Peneliti terdahulu meneliti mengenai “implementasi penyusunan rencana kerja dan anggaran belanja kementerian pertanian sektor pertanian tahun 2005-2012” untuk menganalisis kesesuaian implementasi penyusunan dokumen RKA-K/L yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dengan konsep penganggaran terpadu, PBK dan KPJM. Sejak awal reformasi sistem perencanaan dan penganggaran, dan sejak dampak pengeluaran Kementerian Pertanian pada penelitian, pengembangan dan penyuluhan pertanian, pengadaan prasarana dan sarana pertanian, rencana peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas, ini tentang pengelolaan keuangan nasional. Sebagaimana diatur dalam satu paket peraturan perundang-undangan. Produk pertanian, serta subsidi pupuk dan benih terhadap kinerja sektor pertanian.

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup proses anggaran Kementerian Pertanian dan kesesuaian dengan prinsip penganggaran yang komprehensif, PBB dan KPJM yang sebagaimana sudah diatur dalam kebijakan pengelolaan anggaran nasional. Sejak reformasi perencanaan dan anggaran (yaitu, sejak 2005) mulai dilaksanakan. ((Sukmawati, Siregar, & Nuryartono, 2013)

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Sekretariat Presiden memaparkan mengenai sumber daya yang mempengaruhi perencanaan; proses perencanaan yang dilakukan; dan hasil dari perencanaan tersebut. Hal tersebut digunakan peneliti untuk mengetahui proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang ada di Sekretariat Presiden. (Nastiti, 2013)

Sumber daya yang mempengaruhi penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran. Dalam melaksanakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, peranan sumber daya tentu sangatlah penting. Sumber daya yang ada sangat menentukan dan mempengaruhi proses penyusunan serta hasil akhir Rencana Anggaran tersebut. Secara umum, sumber daya organisasi termasuk pula dalam hal perencanaan antara lain pelaksana perencanaan anggaran, dana, data, sarana prasarana, dan peraturan. Pelaksana perencanaan anggaran di Sekretariat Presiden adalah Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran. Dari segi kualitas, pelaksana perencanaan program dan anggaran telah memadai.

Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) yang merupakan tahap awal dari pelaksanaan rangkaian kegiatan. RKA digunakan untuk mencatat dan merencanakan rencana kerja dan anggaran masing-masing unit, sehingga alokasi keuangan organisasi selalu dapat direncanakan. Lebih penting lagi, dengan adanya RKA ini diharapkan setiap unit dapat merencanakan kegiatannya di tahun ajaran berikutnya agar dapat dikelola dengan baik oleh unitnya sendiri. (Yulyantari, 2016)

Penyusunan RKA juga dilakukan di STMIK STIKOM Bali, khususnya oleh unit atau bagian laboratorium. Ada 9 laboratorium di bawahnya. Bagi penanggung jawab laboratorium, sangat merepotkan ketika harus meringkas semua RKA yang dihasilkan oleh semua sub-departemen. Setiap departemen menyusun RKA dalam format excel, kemudian mengumpulkan RKA tersebut kepada penanggung jawab laboratorium untuk selanjutnya memperkenalkan kegiatan yang direncanakan. Setelah kegiatan-kegiatan tersebut dipresentasikan dan disetujui, maka selanjutnya adalah memasukkan anggaran yang berkaitan

dengan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan tersebut.

Namun seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan untuk mengelola informasi dari data RKA, maka pihak laboratorium mengusulkan untuk membuat sistem informasi yang dapat menangani pengelolaan RKA, yang dapat memberikan laporan untuk membantu pengelolaan dan koordinasi RKA masing-masing sub unit. Pengguna sistem itu sendiri adalah seluruh bagian dari laboratorium STMIK STIKOM Bali. Sistem informasi ini diharapkan dapat digunakan tanpa kendala ruang dan waktu, sehingga pengguna dapat memasukkan data RKA di rumah atau di kantor. Oleh karena itu, sistem informasi yang sesuai yang digunakan harus dapat diakses secara online atau berbasis web.

Sistem informasi rencana kerja dan anggaran merupakan sistem informasi yang digunakan untuk menyampaikan usulan kegiatan dan perkiraan biaya. Namun sebelum mengembangkan suatu sistem informasi, sistem tersebut harus dirancang terlebih dahulu. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada analisis dan perancangan aplikasi rencana kerja dan anggaran (RKA) laboratorium STMIK STIKOM Bali. Analisis dan desain tersebut akan dijelaskan secara detail dalam dokumen desain yang sering disebut juga dengan spesifikasi desain perangkat lunak (DPPL). DPPL berisi dokumen desain yang akan digunakan sebagai dasar untuk tahapan implementasi sistem selanjutnya. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor yang telah diuraikan secara rinci sebelumnya yaitu rata-rata pelaksana dan anggaran yang terlibat dalam proses perencanaan berfungsi penuh. lama pada jabatan yang didudukinya (lima tahun ke atas).

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif menurut (Jemmy, 2010) Tujuannya adalah untuk menguraikan masalah (kondisi) untuk mengetahui keberadaan masalah, besarnya masalah, sejauh mana masalah tersebut dan seberapa penting masalah tersebut. Biasanya penelitian deskriptif mendeskripsikan masalah (situasi) dengan mendeskripsikan masalah sesuai variabel penelitian, sehingga penjelasannya lebih jelas dan mudah dipahami.

Metode penelitian pada dasarnya adalah metode ilmiah untuk memperoleh data dengan maksud dan tujuan. Data yang diperoleh melalui penelitian ini adalah data empiris (dapat diamati) dengan standar efektif tertentu, yang valid dalam arti ketepatan antara data nyata dengan objek data yang dikumpulkan oleh peneliti.(Sugiyono, 2017)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan kepada pembaca dan mengungkapkan suatu masalah, keadaan, peristiwa sebagaimana adanya atau mengungkapkan fakta secara lebih mendalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, dan kesesuaian dengan peraturan-perturan yang berlaku dalam penyusunan.

#### **4.2 Jenis Data**

1. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan

penelitian melalui mengajukan pertanyaan langsung, dan informasinya bersifat terbuka terhadap data sesuai dengan kebutuhan. Adapun data yang penulis peroleh dari data primer adalah, lokasi penelitian, kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, gambaran perencanaan dan penganggaran serta, data mengenai profil Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang mencakup visi, misi, struktur organisasi, kondisi sumber daya yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, serta informasi mengenai bagaimana implementasi kebijakan serta faktor penghambat dari implementasi Rencana Kerja dan Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan dari sumber-sumber pendukung yaitu dengan cara memperoleh data dari buku, jurnal, Undang-Undang, literatur-literatur, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Adapun data yang penulis peroleh dari data sekunder ini adalah Laporan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, Undang-Undang yang mengatur tentang kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja serta buku yang berisi teori-teori mengenai proses penyusunan anggaran.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam memperoleh data, maka digunakan teknik pengumpulan data melalui:

1. Observasi

Observasi yakni dengan melakukan peninjauan langsung ke tempat lokasi sumber penelitian, dalam hal ini penelitian dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan melakukan pencatatan dan mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai referensi melalui buku, dokumen, dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Dalam hal ini, dokumentasi bertujuan untuk memperoleh profil Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.

## 3. Studi Pustaka

Studi pustaka ialah pengumpulan data dari berbagai literasi yang relevan dan mempelajari yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Penelitian dengan cara ini data dapat diperoleh dengan jalan melakukan penelitian secara teoritis, yaitu membaca dan mempelajari literatur serta pendapat para ahli yang bersumber dari buku-buku, jurnal, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **3.4 Teknik Analisis Data dan Pengolahan Data**

Untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, Artinya, melalui metode meringkas data yang diperoleh kemudian menginterpretasikan dan menganalisis, sehingga dapat memberikan informasi untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Berikut metode analisis dari penelitian ini :

1. Mempelajari dan menganalisis proses penyusunan Rencana kerja dan

Anggaran dengan mengacu kepada peraturan .

2. Mengumpulkan data dan seluruh informasi yang berkaitan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2020.
3. Mempelajari dan menganalisis penyajian akhir Rencana Kerja dan Anggaran dengan mengacu kepada peraturan .
4. Melakukan evaluasi terhadap Rencana kerja dan Anggaran dengan mengacu kepada peraturan ..
5. Menarik kesimpulan dan memberikan saran bagi perkembangan dan kemajuan instansi, khususnya dalam penyajian dan pelaporan keuangan.

### **3.5 Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, yang terletak di Senggarang, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- . (2011). Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. In - (Ed.), -. Bandung: Fokusmedia.
- . (2013). Standar Akuntansi Pemerintahan. In Mandiri Fokusindo (Ed.), *Terbaru*. Bandung: Fokusindo Mandiri.
- Halim, Abdul Iqbal, M. (2012). Pengelolaan Keuangan Daerah. In - (Ed.), *Ketiga* (Ketiga). Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.
- Hariadi, Pramono Restianto, Yanuar E Bawono, I. R. (2010). Pengelolaan Keuangan Daerah. In - (Ed.), -. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Kamaroesid, Herry. (2013). *Sistem Administrasi Anggaran Negara* (1st Ed.). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mahmudi. (2016a). Akuntansi Sektor Publik. In - (Ed.), *Revisi* (Revisi). Yogyakarta: Uii Press Yogyakarta (Anggota Ikapi).
- Mahmudi. (2016b). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. In - (Ed.), *Edisi Ketiga* (Ketiga). Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.
- Mahsun.Mohamad. (2016). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. In - (Ed.), *Edisi Pertama* (Pertama). Yogyakarta: Bpfe-Yogyakarta.
- Mulyana, B. (2014). Akuntansi Pemerintah Daerah. In A. Kusmanadji Sulaeman, Agus Sunarya Priharjanto, Akhmad Hadiwibowo, Yuniarto Prabowo, Muhadi Widihatmoko, Agung Waluyo, Budi. Pratin Biswan (Ed.), *Cetakan Pertama* (Pertama). Tangerang Selatan: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Nastiti, R. (2013). *Analisis Proses Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Sekretariat Presiden Tahun 2013 Kepastian Pendanaan Pemerintah , Dalam*

*Keadaan Di Mana Dana Yang Tersedia Penganggaran Sektor Publik Di Indonesia Sendiri Mengalami Perubahan Dengan Diberlakukannya Unda.*

Nordiawan, Deddi Hertianti, A. (2010). Akuntansi Sektor Publik. In L. Alfiah (Ed.), *Edisi 2* (2nd Ed.). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (26th Ed.). Bandung: Alfabet.

Sukmawati, A., Siregar, H., & Nuryartono, N. (2013). Implementasi Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Belanja Kementerian Pertanian Sektor Pertanian Tahun 2005-2012. (1).

Tanjung, A. H. (2011). Penatausahaan Dan Akuntansi Keuangan Daerah Untuk Skpkd Dan Pemerintah Daerah. In Y. Nurnadia (Ed.), *Kedua* (2nd Ed.). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Yulyantari, L. M. (2016). Perancangan Aplikasi Rencana Kerja Dan Anggaran (Rka) Laboratorium. *Jurnal Sistem Dan Informatika*.

## CURICULUM VITAE



Nama : Cinthia Christy

Jeni Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir: Tanjungpinang, 25 April 1998

Status : Menikah

Agama : Islam

Email : Cinthiachrisrtyiskandar@gmail.com

Alamat : Jl. Ganet Perum. Griya Hangtuh Permai RT/RW 005  
Km.12

Pekerjaan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

Pendidikan : - SD Negeri 013 Tanjungpinang  
- SMP Negeri 7 Tanjungpinang  
- SMK Negeri 1 Tanjungpinang  
- STIE Pembangunan Tanjungpinang